

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Ario Dedet Suyudha
Ariodesuy1711@gmail.com
Fidiana Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of intern controlling system disclosure and information technology utilization on the quality of financial statements at Surabaya Local Government agencies. The research was quantitative research. Moreover, data were primary; in which they were taken through questionnaires. The questionnaires were distributed to respondents. Furthermore, the population was Surabaya Local Government Agencies. Additionally, the data collection technique used purposive sampling technique, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 100 samples from 20 Local Government Agencies. In addition, the data analysis technique used multiple linier regression analysis with SPSS (Statistical Product and Service Solution) 23. The research result concluded that intern controlling system disclosure had a positive effect on the quality of financial statements at Surabaya Local Government Agencies. Likewise, information technology utilization had a positive effect on the quality of financial statements at Surabaya Local Government Agencies.

Keywords: quality of local government financial statement, intern controlling system, information technology

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah dinas Satuan Kerja Perangkat daerah kota Surabaya. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampling dengan kriteria-kriteria yang telah di tentukan. Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut didapatkan sebanyak 100 sampel dari 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Motede analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Surabaya.

Kata Kunci: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern, teknologi informasi

PENDAHULUAN

Berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah (agen) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal) (Mahmudi, 2010).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menjelaskan tentang pelaporan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan Keuangan dan kinerja instansi pemerintah daerah

menggambarkan hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggungjawab pengelolaan anggaran keuangan selama periode tertentu (Peraturan Pemerintah No 8, 2006).

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila laporan tersebut mempunyai umpan balik yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu dan memiliki manfaat prediktif yang dapat digunakan oleh pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, serta lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan dikatakan dapat dibandingkan apabila laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas lainnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Laporan keuangan dapat dipahami apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Surabaya bisa dikatakan membaik dengan opini audit dari tahun ketahun semakin baik. Terbukti kota Surabaya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2011, meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2012 - 2014, dan pada tahun anggaran 2015 - 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bapak Joko Agus Setyono selaku kepala BPK perwakilan Jawa Timur mengatakan bahwa pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Hal tersebut bukan berarti bahwa laporan keuangan yang disajikan terbebas dari fraud atau kecurangan. Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, Badan Pengawas Keuangan (BPK) masih menemukan kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi tingkat kewajaran dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Masalah tersebut antara lain kesalahan penganggaran pada lima SKPD kota Surabaya mengenai pengelolaan hibah biaya pendidikan daerah bagi sekolah belum memadai diantaranya pertanggungjawaban 47 satuan pendidikan penerima hibah biaya pendidikan (www.suarasurabaya.net, 2020).

Dalam pencapaian yang sudah didapatkan, hal tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa pemerintah kota Surabaya selalu berusaha menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik kualitatif yang telah disyaratkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk setiap tahun anggaran. Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, peran pegawai selaku pengelola laporan keuangan pemerintah daerah dan melakukan pelaporan keuangan sangatlah penting, maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah dilakukan dengan adanya penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara menyeluruh diselenggarakan di lingkungan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah No 60, 2008). Unsur – unsur yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Resiko, (3) Informasi dan Komunikasi, dan (4) Pemantauan. Pimpinan suatu organisasi harus dapat menjadikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini menjadi tanggung jawab bersama setiap individu demi tercapainya sasaran organisasi serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam rangka mendukung percepatan penyampaian informasi keuangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat perlu di lakukan perubahan terhadap peraturan mengenai batas waktu penyampaian, prosedur pemberian peringatan, dan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah No 65, 2010). Informasi Keuangan Daerah yang di sampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Apakah penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Stakeholder Theory

Stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan di pengaruhi oleh perusahaan (Ayudia, 2017). Definisi *stakeholder theory* menurut para peneliti mempunyai perbedaan, namun pada dasarnya memiliki prinsip yang sama yaitu perusahaan atau organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi. *Stakeholder Theory* umumnya merupakan teori bagi perusahaan sektor swasta, akan tetapi sudut pandang teori ini dapat diterapkan pada sektor publik dan sebagian pula diterapkan dalam konteks keputusan manajerial dalam pemerintahan (Arifin, 2016). Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan a asersi dari pihak manajemen pemerintah yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak lain, yaitu kepada pemangku kepentingan tentang kondisi keuangan pemerintah daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2008)

Laporan keuangan yang berkualitas di harapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal yaitu para pegawai, sedangkan pemangku kepentingan eksternal yaitu dewan perwakilan rakyat, para pembayar pajak, dan masyarakat, dimana pemangku kepentingan dan organisasi saling mempengaruhi dari hubungan sosial keduanya dalam bentuk responsibilitas dan akuntabilitas yang di wujudkan dengan menyusun laporan keuangan yang handal, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan (Arifin, 2016).

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986 yang dibangun untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi di terimanya penggunaan teknologi informasi dan dapat memberikan manfaat yang baik pula untuk penggunaannya. *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yang lebih dahulu di kembangkan oleh Fishbein dan Ajzen pada 1980. Tujuan utama dari *Technology*

Acceptance Model (TAM) adalah menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (*acceptance*) pengguna terhadap suatu sistem informasi. Teori ini menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan dan perilaku, tujuan, dan penggunaan aktual dari pengguna (*User*) suatu sistem informasi.

Dalam teori *Technology Acceptance Model (TAM)* manfaat yang dirasa terhadap manfaat teknologi dapat diukur dari beberapa faktor sebagai berikut: (1) Pengguna teknologi dapat meningkatkan produktivitas pengguna, (2) Pengguna teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna, (3) Pengguna teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna (Wijaya, 2006).

Di dalam penggunaan teknologi memberikan suatu kemudahan, hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor, pertama berfokus pada teknologi itu sendiri misal pengalaman pengguna terhadap penggunaan teknologi sejenis. Pengalaman baik pengguna akan teknologi sejenis akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap teknologi. Kedua, reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh oleh pengguna. Reputasi yang baik yang didengar oleh pengguna akan mendorong keyakinan pengguna akan kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Ketiga, mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme *support* yang handal.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (Peraturan Pemerintah No 71, 2010). Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah tingkat baik dan buruknya suatu laporan keuangan pemerintah yang di dasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan mengungkapkan secara penuh dan wajar (Pujanira dan Taman, 2017). Kualitas laporan keuangan di katakan baik apabila informasi yang disajikan dalam dalam laporan keuangan tersebut lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material dan juga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan entitas lain serta informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di pahami oleh para pemangku kepentingan.

Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas, dengan laporan keuangan yang baik dan berkualitas akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggung jawaban terhadap laporan keuangan yang dibuat. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan alat guna memfasilitasi agar laporan keuangan yang dibuat semakin transparan dan akuntabel. Penerapan SAP membuat informasi keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada level pemerintahan serta SAP memiliki kekuatan hukum dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang bermanfaat guna mengevaluasi kinerja organisasi, dan sebagai alat akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan yang tepat dalam lingkup ekonomi sosial dan politik (Arsyati *et al.*, 2008). Laporan keuangan diharapkan menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya, menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang di gunakan dalam kegiatan entitas, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan

pinjaman dan informasi kenaikan atau penurunan pada posisi keuangan entitas pelaporan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan (Devi, 2018).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 60, 2008).

Sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi (Mahmudi, 2010). Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang didalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*intern accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010).

Unsur - unsur yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Resiko, (3) Informasi dan Komunikasi, dan (4) Pemantauan. Dalam unsur lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Pada penilaian resiko, penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah harus ditetapkan diawal dengan jelas dan konsisten pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan. Kemudian mengidentifikasi secara efisien dan efektif yang dapat menghambat pencapaian tersebut baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Pada unsur informasi dan komunikasi, instansi pemerintah harus memiliki informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal serta mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu. Dalam unsur pemantauan, sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

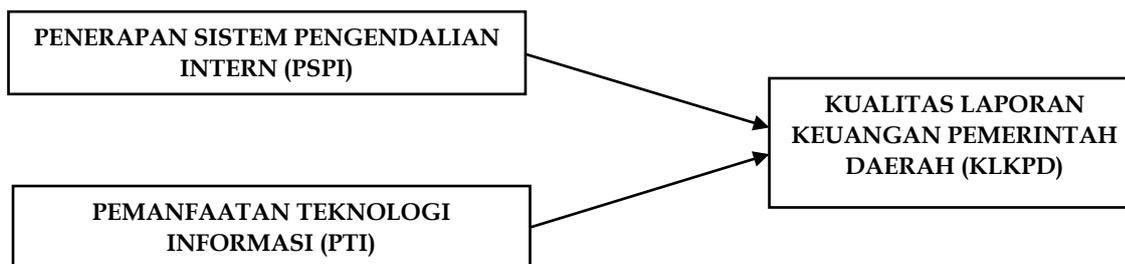
Teknologi merupakan mesin yang menjalankan suatu sistem informasi. Teknologi menjalankan semua sistem informasi dengan cara menangkap *input*, menjalankan model, mengakses data, menghasilkan dan menghasilkan *output* berupa informasi. Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu, komputer, penyimpan data luar (*auxiliary storage*), telekomunikasi, dan perangkat lunak (*software*) (Mulyadi, 2010). Teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), menampilkan (*represent*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi. Untuk mendapatkan sistem informasi yang sesuai, pengembangan sistem informasi memerlukan pengetahuan tentang sistem komputer, sistem informasi, serta pengetahuan merancang dan menerapkan sistem

informasi untuk memperoleh sistem komputer yang di perlukan (Darwanis dan Mahyani, 2009).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pengelolaan data dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat memberikan keunggulan baik dan juga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi. Pemanfaatan teknologi informasi pasti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat pengintegrasian teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali dan Supomo, 2002). Kualitas pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat berkat adanya Pemanfaatan teknologi informasi meliputi; pengolahan data, pengolahan informasi, proses kerja elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi (Hamzah, 2009).

Model Penelitian

Berdasarkan dari tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu maka penelitian ini menjelaskan tentang Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk mempermudah dalam memahami dalam penelitian ini diperlukan adanya model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Setiap organisasi atau instansi pemerintah wajib menerapkan sistem pengendalian intern yang merupakan bagian dari manajemen resiko guna mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Sistem pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan serta mengawasi suatu organisasi dalam upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*). Sistem pengendalian intern terdiri atas prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan terjaminnya laporan keuangan yang andal, serta menjamin di patuhinya peraturan dan hukum yang berlaku (Pradono dan Basukianto, 2015). Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pada pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2005 pasal 16 ayat 1. BPK dalam menilai kewajaran informasi keuangan, salah satu kriteria yang digunakan adalah efektifitas sistem pengendalian intern. Apabila masih ditemukan penyimpangan oleh badan pemeriksa keuangan dalam laporan keuangan berarti laporan keuangan pemerintah belum memenuhi karakteristik atau nilai informasi yang disyaratkan. Jika pemerintah daerah mendapatkan hasil opini dari badan pemeriksa keuangan berupa tidak wajar atau disclaimer salah satunya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah terkait. Hal

tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan pemerintah daerah.

Penelitian tentang pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh (Pradono dan Basukianto, 2015). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chodijah dan Hidayah, 2018). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan publik dapat di akses secara mudah dan andal oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat di gunakan untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang bersifat material dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Febianti (2018) pernah melakukan penelitian pada pemerintah Bandung tentang pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sama halnya dengan penelitian yang di lakukan (Soimah, 2014) pada pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Utara, yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian dari (Mene et al., 2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Populasi Objek Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Objek dari penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu penarikan sampling secara tak acak dengan prosedur *purposive sampling*, dimana sampel akan dipilih berdasarkan pertimbangan atau karakteristik tertentu.

Kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk Kepala Dinas/Badan/Kantor mulai dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu pada SKPD kota Surabaya yang mengijinkan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Sehingga didapatkan sampel

penelitian sebanyak 20 Dinas di SKPD kota Surabaya yang disajikan pada Tabel 1, Dengan total 100 responden.

Tabel 1
Daftar SKPD kota Surabaya

NO	SKPD Kota Surabaya
1	Dinas Tenaga Kerja
2	Dinas Sosial
3	Dinas Perhubungan
4	Dinas Pendidikan
5	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
6	Dinas Kesehatan
7	Badan Pengelolah Keuangan dan Pajak Daerah
8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Dinas Pengerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
11	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
12	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
15	Dinas Perdagangan
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sumber: www.surabaya.go.id, 2020

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuisisioner yang dibagikan kepada responden, yaitu kepala dinas atau setara kepala dinas bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode survei dengan bantuan kuisisioner.

Jenis kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner tertutup. Artinya responden harus memilih jawaban yang telah disediakan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Penilaian untuk setiap jawaban dari responden menggunakan skala likert antara 1-5 dengan tingkat perfensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut, Sangat Tidak Setuju (STS) = Skor 1, Tidak Setuju (TS) = Skor 2, Ragu-ragu (RR) = Skor 3, Setuju (S) = Skor 4, Sangat Setuju (SS) = Skor 5.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Pada variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi, yaitu penerapan sistem pengendalian intern (X1), dan pemanfaatan teknologi informasi (X2).

Definisi operasional dari setiap variabel penelitian dijelaskan sebagai berikut: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan

material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan instrumen penelitian Nugroho (2018) yang telah dimodifikasi dan menambah beberapa pertanyaan dari instrumen yang pernah digunakan oleh Kusumo (2018).

Penerapan Sistem Pengendalian Intern (X1) adalah suatu proses untuk menerapkan suatu sistem yang bertujuan untuk memberikan arahan dan pengawasan serta memberikan keyakinan dan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator variabel sistem pengendalian intern pemerintah dilihat dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah diukur dengan instrumen penelitian Nugroho (2018) yang telah dimodifikasi kalimat pernyataannya dan menambah beberapa pernyataan dari instrumen yang pernah digunakan oleh Kusumo (2018).

Pemanfaatan teknologi informasi (X2) mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah. Indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi dilihat dari penggunaan komputer dan jaringan internet. Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan instrumen penelitian Nugroho (2018) yang telah dimodifikasi kalimat pernyataannya dan menambah beberapa pernyataan dari instrumen yang pernah digunakan oleh Kusumo (2018).

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif di gunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai demografi responden dalam penelitian dan memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu penerapan sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Uji Kualitas Instrumen Uji Validasi

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam hal ini koefisien yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (*level of signifacance*) menunjukkan bahwa pertanyaan- pertanyaan tersebut sudah sah sebagai pembentuk indikator (Ghozali, 2011:45). Adapun dasar analisis yang digunakan pengujian validitas yaitu: a) Jika $\text{sig} > (\alpha) 0.05$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid; b) Jika $\text{sig} < (\alpha) 0.05$ maka butir atau variabel tersebut valid (Ghozali, 2011:53).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu konstruk variable dikatakan baik apabila memiliki nilai Alpha Conbach $s > 0,60$ (Ghozali, 2011:147).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 0.05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0.05 maka data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2016:154).

Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. *Tolerance* digunakan untuk mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi jika nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang biasa dipakai adalah nilai *tolerance* 0.10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali, 2016:103).

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila terdapat varian yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas didalam model regresi dapat dilihat dengan uji glejser dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan jika variabel bebas terdiri dari dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2011). Adapun persamaan dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$KLKPD = \alpha + \beta_1PSPI + \beta_2PTI + e$$

Keterangan :

α	: Konstanta
KLKPD	: Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
β_1, β_2	: Koefisien Korelasi Ganda
PSPI	: Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern
PTI	: Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi
e	: Error

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model tersebut dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R² yang lebih kecil maka variasi variabel dependen yang sangat terbatas. Sedangkan nilai R² mendekati 1 berarti variabel- variabel independen sudah

dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011:97).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F atau yang sering disebut dengan kelayakan model (*goodness of fit*) digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada penelitian yang berarti layak untuk diuji. Model *goodness of fit* dapat diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan pada uji kelayakan model / uji F adalah (1) Jika nilai *goodness of fit statistic* $>0,05$ maka H_0 ditolak, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian belum tepat. (2) Jika nilai *goodness of fit statistic* $<0,05$ maka H_0 diterima, berarti model mampu memprediksi nilai observasi sehingga model penelitian sudah tepat.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2012:98). Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah (1) Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis di terima. Hipotesis tidak dapat ditolak bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif variabel penelitian memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Data selengkapnya mengenai statistic deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSPI	93	68	95	80,87	6,252
PTI	93	30	40	34,92	2,935
KLKPD	93	40	55	47,92	3,771
Valid N (listwise)	93				

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa jumlah responden (N) adalah 93 responden. Hasil analisis dari statistik deskriptif variabel penerapan sistem pengendalian intern memiliki nilai terendah 68 dan nilai tertingginya 95, nilai rata-rata (*Mean*) adalah 80,87 dan standar deviasi 6,252. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai dinas pada SKPD rata-rata menjawab setuju berarti pegawai dinas pada SKPD kota surabaya dalam menyusun laporan keuangan sudah mempertimbangkan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta melakukan pemantauan.

Hasil analisis dari statistik deskriptif variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai terendah 30 dan nilai tertingginya 40, nilai rata-rata (*Mean*) adalah 34,92 dan standar deviasi 2,935. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai dinas pada SKPD rata-rata menjawab setuju berarti pegawai dinas pada SKPD kota Surabaya memanfaatkan teknologi informasi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil analisis dari statistik deskriptif variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 55, nilai rata-rata (*Mean*) adalah 47,92 dan standar deviasi 3,771. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai dinas pada SKPD rata-rata menjawab setuju berarti pegawai dinas pada SKPD kota surabaya dalam menyusun laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validasi

Pengujian validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji signifikansi untuk memenuhi validitas yaitu membandingkan apabila nilai r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif maka dapat disimpulkan indikator tersebut valid.

Tabel 3
Hasil Uji Validasi

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Signifikansi	Keputusan
	PSPI_1	0,611	0,203	0,000	Valid
	PSPI_2	0,631	0,203	0,000	Valid
	PSPI_3	0,662	0,203	0,000	Valid
	PSPI_4	0,707	0,203	0,000	Valid
	PSPI_5	0,653	0,203	0,000	Valid
	PSPI_6	0,532	0,203	0,000	Valid
	PSPI_7	0,666	0,203	0,000	Valid
Penerapan Sistem	PSPI_8	0,584	0,203	0,000	Valid
	PSPI_9	0,658	0,203	0,000	Valid
Pengendalian Intern	PSPI_10	0,503	0,203	0,000	Valid
	PSPI_11	0,600	0,203	0,000	Valid
	PSPI_12	0,666	0,203	0,000	Valid
	PSPI_13	0,692	0,203	0,000	Valid
	PSPI_14	0,700	0,203	0,000	Valid
	PSPI_15	0,733	0,203	0,000	Valid
	PSPI_16	0,561	0,203	0,000	Valid
	PSPI_17	0,647	0,203	0,000	Valid
	PSPI_18	0,494	0,203	0,000	Valid
	PSPI_19	0,554	0,203	0,000	Valid
	PTI_1	0,660	0,203	0,000	Valid
	PTI_2	0,713	0,203	0,000	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	PTI_3	0,718	0,203	0,000	Valid
	PTI_4	0,782	0,203	0,000	Valid
	PTI_5	0,794	0,203	0,000	Valid
	PTI_6	0,818	0,203	0,000	Valid
	PTI_7	0,666	0,203	0,000	Valid
	PTI_8	0,591	0,203	0,000	Valid
	KLKPD_1	0,652	0,203	0,000	Valid
	KLKPD_2	0,623	0,203	0,000	Valid
	KLKPD_3	0,577	0,203	0,000	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	KLKPD_4	0,601	0,203	0,000	Valid
	KLKPD_5	0,651	0,203	0,000	Valid
	KLKPD_6	0,712	0,203	0,000	Valid
	KLKPD_7	0,685	0,203	0,000	Valid
	KLKPD_8	0,654	0,203	0,000	Valid
	KLKPD_9	0,650	0,203	0,000	Valid
	KLKPD_10	0,717	0,203	0,000	Valid
	KLKPD_11	0,656	0,203	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Tabel 3 pada variabel penerapan sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel ($df = 91$; $\alpha = 0.05$), sehingga semua indikator pertanyaan PSPI_1 sampai dengan PSPI_19 pada variabel Penerapan Sistem Pengendalian

Intern diatas 0,203, hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern dinyatakan valid.

Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (df = 91; $\alpha = 0.05$), sehingga semua indikator pertanyaan PTI_1 sampai dengan PTI_8 pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diatas 0,203, hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dinyatakan valid.

Pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (df = 91; $\alpha = 0.05$), sehingga semua indikator pertanyaan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diatas 0,203, hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu angka dinyatakan konsisten pada suatu alat ukur dalam objek yang sama. Kuesioner dinyatakan handal jika pada kuesioner yang di jawab konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dinyatakan baik jika memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Penerapan Sistem Pengendalian Intern	0,911	19	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,865	8	Reliabel
Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,864	11	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Hasil Pengujian yang tersaji pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada penerapan sistem pengendalian intern 0,911, nilai Cronbach's Alpha pada pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,865 dan nilai Cronbach's Alpha pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,864. Artinya nilai Cronbach's Alpha pada setiap variabel lebih besar dari 0,60 sehingga semua item pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan Reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,49790913
Most Extreme Differences	Absolute	,152
	Positive	,152
	Negative	-,125
Kolmogorov-Smirnov Z		,152
Asymp. Sig. (2-tailed)		,331 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2020

Uji Normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode *Kolmogorov Smirnov* dasar pengambilan keputusan, yaitu: a) Nilai Signifikansi $> 0,05$, maka hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal; b) Nilai Signifikansi $< 0,05$, maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas selengkapnya di sajikan dalam Tabel 5.

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 5 diatas dapat di simpulkan bahwa data yang diuji dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0.331 > 0,05$ sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

Metode lain yang dapat digunakan dalam mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafik normal *probability plot*. Apabila data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Grafik normal *probability plot* diperoleh hasil data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$, maka variabel tersebut mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas begitu juga sebaliknya. Berdasarkan pada hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 6, dapat di ketahui bahwa nilai *tolerance* Penerapan Sistem Pengendalian Intern yaitu 0,464 dan nilai *tolerance* Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,464. Sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) Penerapan Sistem Pengendalian Intern 2,156 dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 2,156. Kedua variabel tersebut memiliki nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *tolerance* $\geq 0,10$. Hal ini menunjukkan tidak adanya problem multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
PSPI	,464	2,156	Bebas multikolinearitas
PTI	,464	2,156	Bebas multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2020

Uji Heterokedatisitas

Pengujian Heterokedatisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji ini dilakukan dengan melihat plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), apabila tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedatisitas. Hasil pengujian heterokedatisitas tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heterokedatisitas.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini di gunakan untuk mengetahui pengaruh Penerapan sistem Pengendalian Intern (PSPI) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD). Hasil analisis yang diperoleh dari SPSS 23 dan disajikan dalam Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koef Regresi	t output	Signifikansi	Kesimpulan
PSPI	0,335	5,419	0,000	H ₁ Diterima
PTI	0,308	2,340	0,021	H ₂ Diterima
Konstanta	10,061			
Adjusted R ²	0,552			
F Hitung = 57,574	Sig = 0,000			

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari Tabel 7, maka di dapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KLKP = 10,061 + 0,335PSPI + 0,308PTI + e$$

Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan arah antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada hasil pengujian menunjukkan variabel bebas memiliki koefisien bertanda positif, makna dari besaran yang ada adalah:

Konstanta (α) sebesar 10,061 artinya tanpa Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi atau apabila semua variabel bebas bernilai 0, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (SKPD) di kota surabaya sebesar 10,061.

Nilai koefisien regresi untuk Penerapan Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,335 menunjukkan arah positif. Hal ini dapat di interpretasikan bahwa setiap perubahan satu persen pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan yang di peroleh Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah 0,335 dengan arah yang sama.

Nilai koefisien regresi untuk Penerapan Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,308 menunjukkan arah positif. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap perubahan satu persen pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan yang di peroleh Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah 0,308 dengan arah yang sama.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang di berikan variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil uji Koefisien Determinasi (R²) dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,749 ^a	,561	,552	2,526

a. Predictors: (Constant), PTI, PSPI

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa koefisien determinasi (R²) sebesar 0,561 yang berarti bahwa 56,1% variasi besarnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) kota Surabaya dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Sistem Pengendalian

Intern (PSPI) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI). Sisanya sebesar 43,9% dapat di jelaskan oleh variable lain yang tidak di masukan dalam model.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang di berikan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dimasukkan dalam model dapat dikatakan layak dengan kriteria signifikansi $< 0,05$. Hasil uji statistik F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 57,574 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, karena probabilitas signifikansi $< 0,05$ (5%), sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk digunakan pada penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak nya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat dari uji ini adalah, jika signifikansi dari uji t $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan jika signifikansi dari uji t $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya tidak adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji t

Variabel Independen	Koef Regresi	t output	Signifikansi	Kesimpulan
PSPI	0,335	5,419	0,000	Berpengaruh
PTI	0,308	2,340	0,021	Berpengaruh
Konstanta	10,061			
Adjusted R ²	0,552			
F Hitung = 57,574	Sig = 0,000			

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Hasil pengujian hipotesis yang pertama dapat di ketahui nilai koefisien regresi sebesar 0.335 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai signifikansi t $< 0,05$ sehingga hipotesis pertama berhasil menolak H_0 dan menerima H_1 , jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis yang kedua dapat di ketahui koefisien regresi sebesar 0.308 dengan signifikansi t sebesar 0,021. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai signifikansi t $< 0,05$ sehingga hipotesis kedua berhasil menolak H_0 dan menerima H_2 , jadi dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji penerapan sistem pengendalian interen dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan perangkat kerja kota surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif. Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan pada masing-masing dinas di satuan kerja perangkat daerah kota surabaya, dengan teknik pengambilan sampel *non-probability* yaitu penarikan sampling secara tak acak dengan prosedur *purposive sampling* sehingga di dapatkan sampling sebanyak 100 responden.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah di kota Surabaya. Hal ini dapat diartikan bahwa meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern akan diikuti oleh meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Surabaya.

Penerapan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah di kota Surabaya. Hal ini dapat diartikan bahwa meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi akan diikuti oleh meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Surabaya.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Penelitian ini hanya menggunakan 2 faktor yaitu sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada dinas dan badan kota Surabaya dengan jumlah 17 Dinas dan 3 Badan dengan jumlah sampel 100 responden.

Saran

Mengacu pada simpulan yang telah dijelaskan, maka saran penelitian ini dapat di jelaskan bahwa peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan variabel-variabel lain selain yang di gunakan dalam penelitian ini yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di kota Surabaya seperti, kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit atau sistem akuntansi keuangan daerah.

Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian di satuan perangkat daerah lainnya seperti sekretariat daerah, sekretariat DPRD, badan, kecamatan dan kelurahan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan generalisasi untuk memperlihatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik dan kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2016. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada kelompok lanjut usia di wilayah kerja upt puskesmas petangi kabupaten Bandung tahun 2016. *E Journal Medika*, 5(7).
- Arsyati A., D. Darwanis, dan M. A. Djalil. 2008. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNPB Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1: 29-49.
- Ayudia, D. P. 2017. Analisis Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure, Intellectual Capital Disclosure, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015). *Skripsi*. Universitas Lampung. Lampung.
- Chodijah, S., dan Hidayah, N. 2018. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Tekun*, 8(1). Maret 2018.
- Darwanis, dan Mahyani, D. D. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2: 133-151.
- Devi, S. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian

- Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD kota Surabaya). *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Febianti, I. 2018. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah (Survey Pada Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Bandung.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hamzah, A. 2009. Evaluasi Kesesuaian Model Keprilakuan dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi di Indonesia, Seminar Nasional Aplikasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SNSTI).
- Indriasari, D., dan Nahartyo, E. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir). *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, 23-24 Juli*, Pontianak.
- Jurnali, T., dan Supomo, B. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan pemanfaatan TI terhadap kinerja akuntan publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5(2), 214.
- Kusumo, G., R. 2018. Analisis Faktorfaktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul). Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Nugroho, B., S. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali). Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIE YKPN. Jakarta
- Mene, R. E., Karamoy, H., dan Warongan, J. D. . 2018. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(04): 133-143. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20045.2018>
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Salamba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No 60. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 2.
- Peraturan Pemerintah No 65. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Aturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. 9(1), 76-99. <https://doi.org/10.1558/jsrnc.v4il.24>
- Peraturan Pemerintah No 71, T. 2010. 2010. *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 1-30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Pemerintah No 8. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. 15(May), 58.
- Pradono, F. C., dan B. Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, Vol 22, No. 2. ISSN 1412-3126.
- Pujanira, P., dan Taman, A. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>

- Soimah, S. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R dan D*. Alfabeta. Bandung.
- Wijaya, S. W. 2006. Kajian Teoritis Technology Acceptance Model Sebagai Model Pendekatan Untuk Menentukan Strategi Mendorong Kemauan Pengguna Dalam Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi*. Yogyakarta.
- www.suarasurabaya.net. 2020. *Surabaya Pertahankan Opini WTP dari BPK - Suara Surabaya*. Suara Surabaya. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/surabaya-pertahankan-opini-wtp-dari-bpk/>